

**KEBANGKITAN PEREKONOMIAN  
INDONESIA DARI KETERPURUKAN**

KKB

338.959 8

Eff

K -



Pidato Pengukuhan

Disampaikan pada pengukuhan Jabatan Guru Besar  
dalam bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga  
di Surabaya pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2002

oleh:

09 69 06 111

**H. EFFENDIE**

**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

Pidato Pengukuhan... tan perekonomian....

Effendie

*Allah S.W.T. berfirman bagi yang berfikir :*

*Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah Kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu.*

*Maka apakah kamu tiada memahaminya.*

*(Surat Al-Anbiyaa: 10)*

*Dan*

*Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Dengan Kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti KeridhoanNya ke jalan Keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinNya,.....*

*(Surat Al-Maidah: 15-16)*

Bismillahirrahmaanir rahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat,

Bapak Ketua dan anggota Dewan Penyantun Universitas Airlangga,  
Bapak Rektor dan Para Pembantu Rektor Universitas Airlangga,  
Bapak Pimpinan Fakultas, Program dan Lembaga di lingkungan  
Universitas Airlangga,

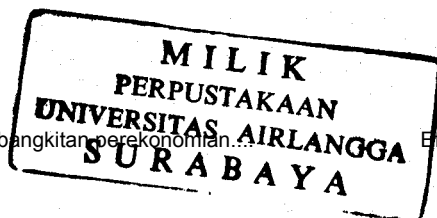
Para Guru Besar Universitas Airlangga,  
Rekan Pengajar dan segenap Sivitas Akademika Universitas  
Airlangga, serta para undangan dan hadirin sekalian yang saya  
mulikan.

Pada kesempatan yang amat berbahagia ini perkenankanlah  
saya memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat  
rahmat dan hidayahNya semata kita semua dapat mengikuti acara  
peresmian penerimaan diri saya sebagai guru besar dalam ilmu  
ekonomi di Universitas Airlangga.

Salam dan salawat saya curahkan kepada junjungan Nabi  
Muhammad SAW dan keluarga serta para sahabat dan  
pengikutnya.

Selanjutnya perkenankanlah saya menggunakan mimbar  
akademik yang mulia ini untuk mengemukakan pandangan saya  
mengenai kondisi perekonomian Indonesia pada masa baru lalu,  
masa kini dan proxi masa depan, dengan judul:

**KEBANGKITAN PEREKONOMIAN INDONESIA  
DARI KETERPURUKAN**



Para Undangan dan hadirin yang terhormat,

Pada dekade sembilan puluhan sebelum pertengahan 1997 Pemerintah Indonesia seringkali menyatakan bahwa fundamental perekonomian Indonesia adalah kuat dan tangguh. Pernyataan publik yang bernuansa politik itu mampu menebar rasa lega dan tenang pada masyarakat luas, tetapi sekaligus menyesatkan.

Memang tidak dapat dilupakan bahwa perekonomian pada saat itu mengalami pertumbuhan yang tinggi. Selama periode 1993-1995 pertumbuhan itu mencapai rata-rata 7,5%, dan pada tahun 1996 mencapai 7,8%.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini menjadi alasan kuat bagi Bank Dunia pada pertengahan tahun 1997 menyatakan bahwa Indonesia sustaining high growth. Dan laporan Bank Dunia pada CGI (Consultative Group on Indonesia) itu mencerminkan penilaian yang baik dari lembaga keuangan internasional terhadap kinerja perekonomian Indonesia sebelum mengalami keruntuhannya.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa sebelum pertengahan 1997 maka inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang relatif rendah. Sampai dengan tahun 1996 tingkat inflasi berada pada angka satu digit dan pada pertengahan tahun 1997 mencapai 6,47%. Tingkat inflasi yang rendah itu berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang cukup baik atas pendapatan yang diperolehnya.

Gambaran perekonomian Indonesia yang cerah sebelum mengalami krisis itu tercermin pula dari peningkatan secara bertahap atas pendapatan perkapita sehingga pada awal tahun 1997 mencapai US \$ 1.184. Dengan pendapatan perkapita itu Indonesia bukan tergolong negara miskin dan sudah dapat digolongkan pada jajaran negara berkembang. Selain itu cerahnya ekonomi Indonesia tersebut ditopang oleh cadangan devisa yang cukup besar. Pada tahun fiskal 1994/1995 cadangan devisa nasional

telah mencapai US \$ 13,3 milyar dan pada tahun fiskal 1995-1996 meningkat sebesar US \$ 2,7 milyar sehingga menjadi US \$ 16 milyar. Kemudian pada tahun 1996 menjadi US \$ 18,5 milyar dan pada tahun 1997 meningkat lagi menjadi US \$ 21,4 milyar. Oleh karena itu cukup beralasan bagi pemerintah mengumumkan bahwa fundamental perekonomian masih cukup kuat dan tangguh pada saat mulainya gejolak moneter di Muangthai pada pertengahan tahun 1997.

Pemerintah Indonesia pada saat itu menyatakan bangsa Indonesia tak perlu mengkhawatirkan gejolak moneter itu dan berpendapat bahwa walaupun guncangan krisis di Muangthai itu dapat merembet ke Indonesia akan segera kembali pada titik keseimbangan baru.

Peningkatan cadangan devisa nasional yang terjadi sampai dengan pertengahan tahun 1997 merupakan hasil dari surplus nilai export di atas nilai import atas barang (merchandise). Surplus ini merupakan bagian yang memperkecil defisit neraca berjalan (current account) dalam neraca pembayaran (balance of payment) Indonesia.

Ternyata defisit neraca berjalan ini disebabkan oleh defisit atas netto jasa (net service). Tetapi dengan adanya surplus neraca modal (capital account) maka neraca pembayaran Indonesia menjadi surplus dan cadangan devisa nasional itu bertambah besar lagi. Yang menarik untuk dicermati dari indikator makro ekonomi dalam dasawarsa sembilan puluhan adalah bahwa upah riil telah meningkat rata-rata 5,9% selama periode 1990-1996. Demikian pula penduduk miskin di Indonesia menurun tajam selama perkembangan ekonomi yang membaik itu. Bila pada tahun 1970 penduduk miskin berjumlah 70 juta jiwa ternyata pada tahun 1996 menurun menjadi 34,5 juta jiwa, suatu penurunan yang cukup dramatis. Dan ini semua menunjukkan indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat secara proporsional terhadap derap laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ini selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga membawa perubahan struktur. Perubahan ini ditandai dengan berubahnya perekonomian Indonesia yang pada awal Repelita I (1973/1974) masih berorientasi agraris (sumbangan sektor industri manufaktur terhadap Gross Domestic Product kurang dari 10%), maka pada tahun 1988 telah menjadi negara dalam proses industrialisasi (industrializing country) karena sumbangan sektor industri manufaktur terhadap G.D.P. telah berada pada kisaran 10-20%. Dan sejak tahun 1992 Indonesia telah tergolong negara semi industri (semi industrialized country) karena sumbangan sektor industri manufaktur terhadap G.D.P. telah berada pada kisaran 20-30%.

Para Undangan dan hadirin yang saya hormati,

Sejalan dengan perkembangan perekonomian Indonesia yang cerah sampai dengan pertengahan tahun 1997, penerimaan negara mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berdasarkan angka realisasi perhitungan anggaran negara, maka penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan (bantuan luar negeri) pada tahun 1993/1994 telah mencapai 66,87 triliun rupiah dan pada tahun 1996/1997 menjadi 99,53 triliun. Perkembangan penerimaan negara yang pesat itu mengakibatkan alokasi pengeluaran pembangunan negara juga meningkat secara proporsional. Pada tahun 1993/1994 anggaran pembangunan itu meliputi 28,43 triliun rupiah, maka pada tahun 1996/1997 menjadi 35,95 triliun rupiah. Peningkatan anggaran pembangunan ini menambah besarnya persediaan barang modal nasional yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar lagi dan mampu menggerakkan roda perekonomian termasuk lembaga keuangan dan perbankan.

Selama periode yang sama pergerakan uang beredar (money supply) yang terdiri dari uang kartal (uang kertas) dan uang giral

(demand deposit) mengalami perkembangan yang cukup pesat pula. Pada tahun 1993 peredaran uang M1 (uang kertas dan giral) itu mencapai 36,81 triliun rupiah dan pada 1997 berkembang menjadi 78,34 triliun rupiah. Demikian pula peredaran uang M2 (M1 + tabungan + deposito berjangka) mengalami perkembangan yang cukup pesat yaitu dari 72,42 triliun rupiah pada tahun 1993 menjadi 146,33 triliun rupiah pada tahun 1997.

Perkembangan peredaran uang ini tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan semakin banyaknya lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang beroperasi di Indonesia disamping perkembangan sektor-sektor lainnya dalam perekonomian Indonesia. Sampai dengan tahun 1993 bank pemerintah maupun bank swasta yang beroperasi telah mencapai 234 bank dan pada tahun 1996 menjadi 239 bank. Pertumbuhan bank yang pesat ini merupakan buah dari kebijakan perbankan Indonesia yang diawali paket Juni 1983 (Pakjun) dan diikuti dengan paket 27 Oktober 1988 (Pakto 88). Kedua paket kebijakan dibidang perbankan itu melonggarkan pembatas dan membuka peluang beroperasinya bank di Indonesia, sehingga mendorong beroperasinya bank dalam jumlah yang cukup besar.

Para Undangan dan hadirin yang mulia,

Kinerja perekonomian Indonesia yang gemilang, sebelum memudar, itu sempat mengangkat derajat Indonesia di mata Bank Dunia sehingga Indonesia dipandang sebagai Southeast Asian Miracle (Keajaiban Asia Tenggara) bersama dengan Malaysia, Filipina dan Thailand. Kelompok negara ini berdampingan dengan kelompok negara Asia lainnya: Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Taiwan dan Singapura yang dikenal sebagai High Performing Asian Economies (HPAEs). Sayang keajaiban kinerja perekonomian Indonesia itu tidak tahan terhadap terpaan badai dan cepat memudar. Realita ini menunjukkan bahwa sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia

itu rapuh, walaupun senantiasa digambarkan secara official kuat dan tangguh oleh pemerintah. Dengan memperhatikan data Indikator Ekonomi Indonesia yang diterbitkan oleh BPS, maka kerapuhan fundamental ekonomi Indonesia dapat diidentifikasi dalam beberapa kebijakan ekonomi dan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah pada saat itu, antara lain:

1. Kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih mengejar pertumbuhan yang tinggi daripada upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan akibat terciptanya kesenjangan sosial yang semakin melebar. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi membuahkan hasil bahwa kelompok masyarakat kaya, pemilik modal besar yang jumlahnya relatif kecil menguasai dan menerima bagian yang besar (sekitar 60%) dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan kelompok masyarakat miskin, pengusaha kecil dan menengah yang jumlahnya relatif besar sekali menerima bagian yang relatif sedikit dari PDB itu.
2. Kebijakan pembangunan yang lebih mengedepankan sistem kekeluargaan, pertemanan atau perkoncoan dan kroni, terutama yang dekat dengan pusat-pusat kekuasaan sehingga menumbuhkan praktek-praktek kolusi dan nepotisme dalam proses pembangunan yang akhirnya bermuara pada kebocoran anggaran pembangunan. Keadaan yang demikian itu menghambat kemampuan untuk meningkatkan produktivitas nasional.
3. Kebijakan menggerakkan roda perekonomian yang lebih mengandalkan atau menggantungkan diri pada sumber pembiayaan luar negeri terutama pinjaman luar negeri mengakibatkan bangsa Indonesia terjebak pada posisi hutang luar negeri yang semakin besar. Sampai dengan tahun 1997 posisi hutang luar negeri ini telah mencapai US \$ 136,09 milyar yang terdiri dari hutang pemerintah sebesar US \$ 53,87 milyar dan hutang swasta sebesar US \$ 82,22 milyar.

Dengan posisi hutang luar negeri yang besar itu dan dengan pengelolaan hutang yang tidak baik atau tidak profesional maka



beban hutang akan terasa berat manakala hutang luar negeri itu memasuki tahapan jatuh tempo dan harus dibayar kembali hutang pokok dan bunganya. Beban pembayaran kembali hutang luar negeri Indonesia pada tahun 1998 mencapai US \$ 34 milyar yang terdiri dari hutang pemerintah sebesar US\$ 6 milyar dan hutang swasta sebesar US \$ 28 milyar.

4. Kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang dijalankan pada saat itu kurang memberi prioritas pada kegiatan ekonomi kerakyatan, tetapi lebih memperhatikan kepentingan kapitalis konglomerat dengan sistem yang tidak sehat.

Oleh karena itu pembangunan dalam pandangan rakyat jelata atau masyarakat kelas bawah tidak memberi harapan kesejahteraan atau kemakmuran, tetapi lebih memberi bayang-bayang ketidakberdayaan dan ketersisihan. Kesemua ini akan menebar kekecewaan sosial yang dalam dan mematikan proses dinamika dan partisipasi sosial.

5. Kebijakan ekonomi dibidang industri lebih mendorong perkembangan industri hilir dan kurang memberi prioritas pada usaha mengembangkan industri hulu. Buah dari kebijakan ini adalah aktivitas sektor riil senantiasa lebih tergantung pada bahan baku dan bahan penolong yang diimport dari luar negeri daripada yang dihasilkan dari dalam negeri. Kondisi ini berakibat lebih jauh pada semakin besarnya permintaan devisa untuk memenuhi kebutuhan import bahan baku dan penolong itu sehingga memberi tekanan yang cukup berat pada cadangan devisa nasional.
6. Kebijakan ekonomi yang berorientasi mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekspor nasional masih belum berhasil mencapai sasaran strategis karena kebijakan sektor ekspor Indonesia itu belum mampu mendorong sektor ekspor nasional menciptakan daya saing yang handal dan manfaat komparatif yang ditawarkan untuk menembus pasar internasional/global. Dan akibat yang lebih jauh adalah bahwa ekspor nasional senantiasa tidak mampu menghasilkan nilai surplus yang memadai dalam menopang

cadangan devisa nasional secara memadai pula. Dengan kondisi seperti itu maka sampai dengan tahun 1996/1997 neraca berjalan senantiasa defisit, walaupun neraca pembayaran Indonesia surplus. Defisit neraca berjalan ini bersama dengan beban pembayaran kembali hutang luar negeri, berupa cicilan pokok hutang dan bunganya, sebagian ditutup oleh devisa masuk berasal dari investasi asing dan sebagian lagi ditutup oleh pinjaman luar negeri. Dampak dari struktur Neraca pembayaran yang tidak sehat ini mengakibatkan peranan investasi asing dan pinjaman luar negeri dalam meningkatkan produktivitas barang modal menjadi mengecil.

7. Kebijakan ekonomi dibidang perbankan yang terlampau longgar disertai dengan liberalisme perbankan yang luas sejak paket Juni 1983 (Pakjun) dan dilanjutkan dengan paket 27 Oktober 1988 (Pakto 88) mengakibatkan rapuhnya sistem pengendalian atas operasi bank-bank di Indonesia oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Akibat dari dari rapuhnya sistem pengendalian perbankan itu adalah timbul ketidakserasian antara jumlah bank yang beroperasi dan kemampuan dalam mengendalikan bank-bank secara sehat. Kondisi demikian ini memberi peluang bagi bank-bank yang nakal dan tidak sehat untuk berbuat pelanggaran yang banyak merugikan masyarakat dan negara.
8. Kebijakan ekonomi dibidang penanaman modal khususnya bagi modal asing merupakan kebijakan yang bermata dua yaitu pada satu sisi memfasilitasi masuknya aliran modal asing dengan berbagai kemudahan yang diberikan. Tetapi pada sisi lain kebijakan itu juga secara tidak langsung membuka kesempatan pelarian modal ke luar negeri bila dipandang perlu oleh investor asing. Pelarian modal ke luar negeri ini dapat menimbulkan implikasi yang luas terhadap ketidakstabilan nilai tukar mata uang, cadangan devisa nasional, dan peningkatan hutang luar negeri.
9. Kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada outward looking daripada inward looking. Ini mengakibatkan ketergantungan yang

serius dari perekonomian Indonesia atas transaksi perdagangan internasional khususnya import barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan ini tidak hanya berupa barang modal, bahan baku, maupun bahan penolong, tetapi termasuk barang-barang jadi yang sebenarnya sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Dampak serius dari kebijakan ini terhadap perekonomian Indonesia timbul manakala terjadi penurunan nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat atau mata uang asing (yang kuat) yang lainnya.

10. Kebijakan ekonomi Indonesia yang banyak diwarnai oleh kebijakan ekonomi pemberi pinjaman luar negeri khususnya International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia yang pada akhirnya menimbulkan ketergantungan yang terus-menerus pada mereka. Hal ini jelas tampak dari adanya persyaratan yang mengharuskan berlakunya perdagangan internasional secara bebas, aliran modal asing yang bebas, serta penggunaan dan nilai hutang luar negeri yang ditentukan oleh pihak kreditor. Kondisi demikian ini menyebabkan timbulnya ketergantungan import barang-barang yang dibayar dengan hutang luar negeri, repatriasi keuntungan atas investasi asing dan pengembalian cicilan hutang negeri yang dibiayai oleh hutang baru dari luar negeri.

Para Undangan dan hadirin yang terhormat,

Kerapuhan fundamental ekonomi sebelum krisis tersebut di atas diperparah dengan situasi dan kondisi sosial politik dan budaya yang tidak kondusif menjelang terjadinya krisis moneter dan krisis ekonomi Indonesia. Situasi dan kondisi itu diantaranya menyangkut:

1. Penataan struktur dan sistem kelembagaan politik yang dibangun dan dikembangkan pada masa pemerintahan Orde Baru berkulminasi pada terbentuknya dominasi kekuasaan di tangan lembaga eksekutif secara sistematis. Pranata politik yang demikian

- ini mengakibatkan fungsi kontrol lembaga legislatif menjadi lemah dan tidak memberikan hasil yang maksimal bagi kepentingan bangsa. Hal ini membuka peluang terjadinya KKN di segala bidang dan pada banyak lapisan birokrasi tanpa kontrol yang berarti.
2. Dominasi kekuasaan lembaga eksekutif yang berlangsung begitu intens mengakibatkan pengaruh lembaga kemasyarakatan di luar jaringan kehidupan politik pemerintah dalam penentuan kebijakan berbangsa dan bernegara menjadi minimal sekali. Kondisi yang demikian ini merupakan hasil optimal dari upaya sistematis untuk mereduksi berbagai kekuatan politik dan menempatkan posisi negara sebagai badan korporasi yang beroperasi di segala bidang dan mendominasi sumberdaya nasional.
  3. Posisi lembaga kemasyarakatan yang tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan kebijakan digantikan oleh kelompok-kelompok pebisnis yang mempunyai kedekatan dengan elite kekuasaan. Konspirasi bisnis antara elite kekuasaan dan kelompok-kelompok pebisnis menghasilkan munculnya konglomerat raksasa yang banyak menguasai sumber daya nasional dan diantara mereka itu memberi andil dalam proses keterpurukan perekonomian Indonesia.
  4. Keterlibatan masyarakat sebagai kekuatan sipil (civil society) kurang mendapat penghargaan sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu skenario pembangunan saat itu kurang memberdayakan ekonomi kerakyatan, karena dibingkai oleh sistem ekonomi kapitalistik yang sarat dengan akumulasi modal. Dampak dari akumulasi modal dalam sistem ekonomi kapitalistik itu sering tidak manusiawi dan tidak ramah terhadap lingkungan hidup, sehingga sering menimbulkan kerugian sosial yang cukup besar.
  5. Merosotnya moralitas bangsa yang mengakar pada berbagai lapisan masyarakat secara struktural mengakibatkan mudahnya terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang sehingga dapat menyebabkan high cost economy (ekonomi biaya tinggi).

Kondisi sosial ekonomi yang bertumpu di atas fundamental ekonomi yang rapuh itu menyebabkan perekonomian Indonesia pada pertengahan tahun 1997 tidak dapat lagi mempertahankan diri terhadap gejolak moneter internasional. Gejolak moneter yang terjadi di Indonesia ini terimbas dari gejolak moneter yang terjadi di Muangthai pada pertengahan tahun 1997 itu. Pada saat itu pemerintah masih mengumumkan bahwa fundamental perekonomian masih cukup kuat dan cadangan devisa masih sekitar empat milyar dollar Amerika Serikat. Atas dasar itu dan dengan pertumbuhan perekonomian yang tinggi dan inflasi yang terkendali pemerintah menghimbau agar masyarakat tak perlu mengkhawatirkan gejolak moneter itu karena guncangan krisis Muangthai itu walaupun akan merembet ke Indonesia akan segera kembali pada titik keseimbangan baru.

Namun kenyataan menunjukkan lain dari apa yang disampaikan pemerintah pada rakyat Indonesia pada saat itu. Beban hutang luar negeri yang besar pada saat itu baik yang merupakan hutang pemerintah maupun hutang swasta memasuki tahapan sebagian harus dibayar kembali karena telah jatuh tempo. Sementara itu perkembangan di sektor industri dan produksi menunjukkan kelemahan di dalam persaingan pasar global, sehingga ekspor Indonesia melemah tetapi importnya semakin meningkat. Peningkatan import itu akibat dari terbuainya masyarakat Indonesia mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri meskipun barang-barang yang sama dapat diproduksi di dalam negeri. Disamping itu karena di dalam struktur perekonomian Indonesia industri hulu belum banyak berkembang sehingga bahan baku industri hilir banyak diimport dari luar negeri. Sebagai konsekwensi dari besarnya import ini cadangan devisa negara menjadi lemah.

Bersamaan dengan kondisi seperti itu harga minyak mentah OPEC, di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya, mengalami penurunan yang cukup drastis pada akhir tahun 1997

yaitu hanya mencapai sekitar 10-11 US \$ per barel, jauh dari harga tertinggi yang pernah dicapai pada tahun 1982 yaitu 35 US \$ per barel. Dengan penurunan harga minyak mentah ini, maka Indonesia tidak mempunyai devisa negara yang bisa diandalkan pada saat itu. Pada sisi lain permintaan dollar Amerika Serikat cukup besar pada tahun 1998 dihitung dari unsur-unsur permintaan:

- Pembayaran beban hutang luar negeri sekitar 34 milyar US \$ yang meliputi hutang swasta sekitar 28 milyar US \$ dan hutang pemerintah sekitar 6 milyar US \$.
- Import barang-barang non migas dan migas sekitar 27 milyar US \$.
- Pelarian modal ke luar negeri yang pada saat itu diperkirakan mencapai  $\pm$  30 milyar US \$.

Dengan adanya tekanan permintaan dollar Amerika Serikat yang amat besar itu menyebabkan nilai rupiah terdepresiasi oleh dollar sehingga nilai dollar lebih tinggi dari kurs resmi. Pergerakan nilai/kurs dollar ini berlangsung dengan cepat sehingga tidak mampu ditanggulangi dengan kebijakan Band intervensi dari Bank Indonesia sebesar 12% dengan kisaran 1 US \$ = Rp. 2.374,00 s/d Rp. 2.682,00 dan nilai tengah yang diharapkan terjadi adalah 1 US \$ = Rp. 2.500,00.

Mengingat cadangan devisa Indonesia yang semakin menipis, maka Bank Indonesia pada akhir tahun 1997 melepaskan band intervensi itu sehingga Indonesia menganut sistem devisa mengambang (floating exchange rate system). Dengan berlakunya sistem devisa ini maka kurs dollar Amerika Serikat melambung bebas.

Pergerakan nilai dollar yang cepat itu selain dipacu oleh keroposnya fundamental ekonomi Indonesia tersebut di atas, dipacu pula oleh faktor sosial politik yang berkembang pada saat itu berupa ketidakstabilan politik dan ketidakpercayaan



masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru dengan segala perangkat kebijakannya. Akibat dari pada itu maka kurs rupiah terjun cepat seperti dikemukakan oleh Latief (2001: 42) sebagai berikut:

Kalau pada awal Juli 1997, Kurs US \$ 1 = Rp. 2.400,00, maka untuk waktu-waktu berikutnya nilainya terus menurun sehingga mencapai titik terendah, yaitu US \$ 1 = Rp. 17.000,00 pada tanggal 17 Juni 1998, artinya nilai rupiah terhadap US \$ tinggal 1/7 nya atau sekitar 14%. Sekitar Nopember-Desember 1998 kurs rupiah terhadap US \$1 sekitar Rp. 7.500,00-Rp. 8.000,00. Artinya, bila dibandingkan dengan awal Juli 1997 nilainya tinggal sekitar 30% sehingga semua barang-barang yang kita impor dengan menggunakan US \$ rata-rata naik sekitar 3-4 kali lipat.

Sebagai konsekuensi logis dari keadaan moneter yang chaos itu barang-barang import secara langsung meningkat harganya yang cukup drastis disamping memacu kenaikan harga barang-barang lain yang diproduksi dengan menggunakan bahan baku/bahan penolong barang-barang import. Akibat lebih lanjut adalah terjadinya kenaikan harga umum yang menyebabkan kenaikan inflasi yang cukup signifikan (lebih dari satu digit). Kemudian sebagai mata rantai berikutnya banyak perusahaan besar yang tidak mampu melanjutkan usahanya karena struktur biaya produksi tinggi yang berakibat harga relatif tinggi pula terhadap daya beli masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu banyak perusahaan yang menutup usahanya, baik karena kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang dalam negeri maupun luar negeri. Penutupan perusahaan itu menyebabkan banyak terjadi PHK dengan akibat tingkat pengangguran menjadi besar.

Kemacetan usaha dan penutupan perusahaan itu merebak pada semua sektor ekonomi termasuk perbankan. Banyak bank-bank swasta yang harus dilikuidasi pada saat itu ( $\pm$  16 bank) karena tidak memenuhi persyaratan kecukupan modal (CAR) maupun karena faktor-faktor lainnya.

Sedangkan bank-bank pemerintah perlu digabung menjadi satu bank yang representatif, karena apabila beroperasi secara individual tidak efisien, merugi dan kurang memenuhi persyaratan.

Keadaan yang dapat dikatakan chaos pada hampir semua sistem perekonomian Indonesia itu mengakibatkan krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Para Undangan dan hadirin yang mulia,

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dan yang bermula dari krisis moneter itu tidak berdiri sendiri tetapi saling terkait dengan perekonomian global dibelahan bumi lain, khususnya di Asia: Thailand, Malaysia, Filipina, Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, Cina dan Jepang. Demikian pula yang terjadi di Rusia, maupun negara-negara Amerika Latin, antara lain Brazilia, Mexico, Venezuela dan Argentina.

Kesemua itu memberi indikasi bahwa sistem bangunan kapitalisme global terancam mengalami kegagalan dan tidak dapat dipertahankan sebagai prinsip pasar yang mengatur dirinya sendiri. Ini mencerminkan pula bahwa teori Adam Smith (pelopor aliran ekonomi klasik) tentang "Invisible hand" yaitu tangan yang tidak terlihat dalam mengatur keseimbangan pasar tidak dapat dipertahankan lagi.

Situasi dan kondisi yang tidak favourable dari krisis perekonomian global ini tidak dapat dipandang ringan karena dampaknya yang cukup luas bagi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia yang terimbas jaringan krisis multidimensi (moneter, ekonomi, politik dan sosial) global itu menanggung beban dampak sosial ekonomi yang cukup parah.

Secara umum derajat kesejahteraan masyarakat Indonesia menurun drastis, sebagaimana dapat dilihat dari menurunnya GNP per kapita penduduk dari 1.055 dollar menjadi 436 dollar. Indikator



lainnya adalah melonjaknya angka pengangguran yang mencapai 15,4 juta jiwa serta berlipatnya jumlah penduduk miskin pada tahun 1998 (dihitung sampai bulan Juni ) menjadi 79,4 juta jiwa (Prasetyantoko, 2001: 49).

Penurunan derajat kesejahteraan masyarakat ini disebabkan karena merosotnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1998 menjadi pertumbuhan minus yaitu minus 13,13% dan pada tahun 1999 pertumbuhan itu hanya 0,85%. Secara makro ekonomi keadaan itu mencerminkan semakin berkurangnya aktifitas produksi, berkurangnya lapangan pekerjaan dan orang yang memperoleh penghasilan serta bertambahnya orang yang menganggur baik secara kentara maupun tidak.

Memburuknya situasi krisis ekonomi... multidimensi telah meluluh lantakkan performance pembangunan yang telah ditata selama lebih dari 30 tahun. Hasil pembangunan yang ditandai dengan gemilangnya kinerja ekonomi,... menjadi sia-sia karena dalam sekejap diterkam oleh sederetan kerusuhan, kekerasan, dan penjarahan yang secara tiba-tiba merajalela di seluruh penjuru tanah air (Prasetyantoko, 2001: 5).

Suasana sosial politik yang cenderung chaotic itu, jika berlanjut terus akan mampu menenggelamkan setiap upaya pemulihan ekonomi dari keterpurukannya. Lebih-lebih bila diingat bahwa Neraca Pembayaran Indonesia masih dalam posisi defisit, cadangan nasional masih sedikit dan hutang luar negeri masih terus bertambah.

Berdasarkan publikasi Bank Indonesia, hutang luar negeri itu telah mencapai US \$ 150,89 milyar pada tahun 1998 yang terdiri dari hutang pemerintah sebesar US \$ 67,33 milyar dan hutang swasta sebesar US \$ 83,56 milyar. Bilamana hutang luar negeri ini masih terus bertambah pada masa depan tetapi kemampuan membayar kembali tidak memadai, maka bisa terjadi Indonesia akan terjebak pada lilitan hutang (debt trap) yang serius.

Karena itu tidak salah apa yang dikatakan oleh Fidel Castro (Presiden Cuba) sekitar 15 tahun lalu bahwa banyak negara yang tidak dapat membayangkan kapan hutangnya dapat dibayar, bahkan mimpi membayar hutangnya saja sulit (Latief, 2001: 107). Lilitan hutang luar negeri ini tidak hanya menjadi beban pemerintah atau pengusaha swasta, tetapi pada akhirnya menjadi beban masyarakat secara keseluruhan baik untuk generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Dalam pada itu keterpurukan ekonomi Indonesia menjadi patron citra buruk bagi investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Akibatnya, selama perekonomian Indonesia terpuruk itu aliran investasi asing menjadi minus sehingga Indonesia termasuk negara yang paling besar mengalami disinvestasi asing. Sementara itu negara lain di Asia yang juga terkena krisis seperti Thailand, meskipun mengalami penurunan modal tetapi masih positif. Aliran PMA di Thailand tahun 1998 sebesar US \$ 7,4 milyar dan tahun 1999 turun US \$ 6,3 milyar. Sementara Malaysia, meskipun melakukan kontrol devisa tetapi justru investasi asing mengalami peningkatan dari US \$ 2,7 milyar tahun 1998 menjadi US \$ 3,5 milyar tahun 1999. Korea Selatan juga mencatat laju investasi asing dari US \$ 5,2 milyar tahun 1998 menjadi US \$ 10,3 milyar tahun 1999 (Haz, 2001: 157).

#### Para Undangan dan hadirin yang mulia,

Dalam Econit's Economic Outlook 1999 disimpulkan bahwa tahun 1999 merupakan tahun yang sangat menentukan apakah perekonomian Indonesia akan cenderung membaik atau sebaliknya. Dalam laporan yang diberi judul "Ekonomi Indonesia 1999 Tahun Penentuan" (A Year of Resolution), dijelaskan bahwa skenario terburuk yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah terporosok ke dalam pola Asia Selatan yang kondisinya

sangat memprihatinkan akibat krisis politik yang tak kunjung selesai (Prasetyantoko, 20001: 15).

Dari data indikator ekonomi Indonesia publikasi BPS antara tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, krisis ekonomi yang berlangsung di Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda pulih kembali pada kuartal III tahun 1999. Ini tampak jelas dari indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada pada posisi minus 13,13% pada tahun 1998 dan pada tahun 1999 hanya mencapai 0,85%. Akibat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah ini pendapatan perkapita Indonesia tahun 1998 hanya mencapai US \$ 436 dan pada tahun 1999 meningkat sedikit menjadi US \$ 485. Dengan pendapatan perkapita sebesar itu Indonesia kembali menjadi negara miskin.

Bila sesudah tahun 1999 perekonomian Indonesia tidak membaik, diperkirakan 2/3 penduduk Indonesia akan berada dibawah garis kemiskinan, sebagai korban inflasi yang tinggi dan penurunan pendapatan akibat krisis ekonomi (Latief, 2001: 42).

Selain laju pertumbuhan ekonomi yang parah pada tahun 1998 dan masih rendah pada tahun 1999, maka laju inflasi juga menunjukkan tingkat yang tinggi sekali yaitu mencapai 77,63% pada tahun 1998 dan pada tahun 1999 menjadi berada pada tingkat yang rendah sekali yaitu sekitar 2% (menjadi satu digit). Demikian pula neraca berjalan (current account) dan neraca pembayaran mengalami defisit yang parah pada tahun 1997 dan 1998 kemudian menjadi surplus rendah pada tahun 1999. Sedang cadangan devisa nasional mengalami penurunan yang drastis dari US \$ 21,4 milyar pada tahun 1997 menjadi US \$ 14,6 milyar pada tahun 1998.

Sebaliknya angka pengangguran melonjak dari 15,4 juta jiwa pada tahun 1998 menjadi 20 juta pada tahun 1999 baik yang merupakan pengangguran terbuka mampu maupun pengangguran tidak kentara/setengah menganggur. Selanjutnya suku bunga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 1997 ke tahun 1998, terutama suku bunga SBI dan deposito jangka waktu satu bulan yaitu:

Untuk SBI: dari 20% tahun 1997 menjadi 38,4% pada tahun 1998. Untuk deposito: dari 25,4% tahun 1997 menjadi 41,4% pada tahun 1998.

Sedang untuk pinjaman antar bank (interbank stay over night) berlangsung di antara bank-bank yang saling membutuhkan likuiditas sesaat berlaku suku bunga (tercatat resmi dilaporkan ) sebesar 40,7% pada tahun 1997 dan 33,4% pada tahun 1998.

Dan selanjutnya, suku bunga yang berlaku untuk pemberian kredit berbagai bank mengalami peningkatan dari tahun 1997 ke tahun 1998. Suku bunga kredit modal kerja yang berkisar antara 18% sampai dengan 23% pada tahun 1997 meningkat menjadi berkisar antara 25% sampai dengan 43% pada tahun 1998. Dan pada tahun 1999 menurun sedikit sehingga berkisar antara 24% sampai dengan 32%. Sedang untuk suku bunga investasi berada pada kisaran yang lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga kredit modal kerja tersebut. Walaupun demikian banyak bank-bank yang beroperasi dengan negative interest spread yaitu beban biaya ditanggung bank lebih tinggi dibanding penghasilan bunga dari pemberian kredit. Oleh karena itu banyak bank-bank yang mengalami kesulitan dan menutup usahanya.

Para Undangan dan hadirin yang terhormat,

Dari indikator ekonomi Indonesia untuk masa tahun 1997-1999 tersebut di atas diperoleh petunjuk bahwa krisis ekonomi Indonesia yang bermula dari krisis moneter mulai pertengahan tahun 1997 belum selesai menjelang akhir tahun 1999. Yang terparah dari krisis itu terjadi pada tahun 1998 karena saat itu kelesuan merebak pada semua kegiatan ekonomi.

Disamping itu ketidakstabilan politik memuncak sebagai reaksi atas tidak dipenuhinya tuntutan rakyat pada pemerintah untuk melakukan reformasi secara menyeluruh yang disuarakan oleh mahasiswa di seluruh tanah air, terutama yang ada di Jakarta dan

sekitarnya. Dan klimaksnya adalah serentetan peristiwa kelabu yang terjadi selama bulan Mei 1998 yang meliputi kenaikan BBM dan tarif listrik yang menimbulkan kekecewaan besar rakyat Indonesia (4 Mei 1998), tewasnya 4 orang mahasiswa Trisakti ditembak aparat keamanan ditengah-tengah massa demonstrasi (12 Mei 1998), kerusuhan, pembakaran dan penjarahan melanda seluruh Jakarta yang dilakukan oleh massa rakyat (13-14 Mei 1998), serta lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kekuasaannya pada B.J. Habibie untuk meneruskan kepemimpinan Nasional (21 Mei 1998).

Kerusuhan, pembakaran dan penjarahan yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya itu sempat menggoncang perekonomian nasional, karena hampir 70% sumber-daya ekonomi ada di Jakarta. Goncangan ini terasa berat bagi rakyat Indonesia khususnya rakyat kecil karena goncangan itu sempat menyebabkan menghilangnya sembako di pasar-pasar tradisional maupun pasar modern (plaza, mal, swalayan).

Kondisi sosial ekonomi dan sosial politik yang memburuk itu berlangsung hingga menjelang akhir tahun 1998 walaupun ada secercah harapan dari kebijakan ekonomi yang akan diambil Presiden baru B.J. Habibie dalam upaya memulihkan perekonomian Indonesia dari keterpurukannya. Namun harapan yang diletakkan pada pundak Habibie itu tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan banyak kalangan selama tahun 1998 kecuali diperoleh bantuan hutang luar negeri dan kurs rupiah yang sempat menyentuh Rp. 7.500,00 per satu dollar. Hal ini disebabkan karena pemerintahan Habibie tidak mempunyai: landasan yang kuat untuk meredam gejolak sosial politik dan visi ke depan untuk memulihkan perekonomian nasional dari krisis multidimensi.

Di samping itu, yang sangat mengganggu pemerintahan Habibie adalah masalah legitimasi kekuasaannya yang banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan. Pemerintahan Habibie dipandang dan diterima sebagai pemerintahan transisional dengan

syarat mampu melaksanakan reformasi total dan membersihkan dirinya beserta seluruh jajaran pemerintahannya dari praktek-praktek KKN. Lebih dari itu pemerintahan ini mendapat beban untuk menyiapkan Pemilu yang bebas dan demokratis pada pertengahan tahun 1999. Pemilu ini dapat digunakan untuk mendapatkan legitimasi jabatan presiden melalui mekanisme Sidang Umum MPR yang dibentuk atas hasil pemilu itu.

Ternyata Sidang Umum MPR yang diselenggarakan pada tanggal 1-21 Oktober 1999 tidak dapat menerima pertanggungjawaban Presiden Habibie sebagai mandataris MPR terutama yang terkait dengan pelaksanaan reformasi dan kebijakan pemulihan ekonomi, sehingga tidak dapat meneruskan kedudukannya sebagai presiden pada masa jabatan berikutnya (1999- 2004). Dan dari hasil Sidang Umum MPR ini telah terpilih duet K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Sukarno Putri sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 1999-2004. Pada awal penyelenggaraan pemerintah Gus Dur-Megawati ini sampai akhir tahun 1999 tidak banyak yang dihasilkan dalam upaya memulihkan perekonomian Indonesia dari keterpurukannya, selain pembentukan Dewan Ekonomi Nasional. Dewan ini diharapkan mampu menghasilkan konsep-konsep kebijakan ekonomi yang diajukan pada Presiden guna ditetapkan sebagai dasar kebijakan pemulihan ekonomi. Namun setelah berjalan beberapa bulan ternyata kebijakan ekonomi masih tanpa arah dan kiprahnya belum jelas (Didik Rachbini, dalam Sadli, 2001: 310).

Walaupun demikian proses pemulihan ekonomi mulai berlangsung menjelang akhir tahun 1999 meskipun bukan karena implementasi kebijakan pemerintah, tetapi lebih karena adanya kekuatan yang ada dalam masyarakat dan karena imbas proses pemulihan ekonomi yang berlangsung di Asia Timur, khususnya Korea Selatan, Taiwan dan Jepang.

Dari kalangan dalam negeri diperoleh gambaran pendapat umum bahwa pada akhir tahun 1999 "krisis ekonomi sudah bottoming out" dan pemulihan tingkat produksi dan investasi sudah berjalan. Tetapi perkiraan laju pertumbuhan ekonomi untuk tahun 1999 adalah rendah, sekitar ... 0,85 persen. (Sadli, 2001: 316). Walaupun demikian pertumbuhan ekonomi yang positif (rendah) itu sudah memberi salah satu petunjuk akan kebangkitan ekonomi Indonesia dari keterpurukannya.

Dan ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin membaik pada tahun 2000 yaitu menjadi sebesar 4,77% dan sampai dengan kuartal III tahun 2001 telah mencapai 2,95% (yang pada akhir tahun 2001 diperkirakan mencapai sekitar 5%).

Disamping itu dari indikator makro ekonomi lainnya dapat diketahui tanda-tanda kebangkitan ekonomi Indonesia, diantaranya:

1. Nilai ekspor bergerak dari US \$ 48,67 milyar pada tahun 1999 menjadi US \$ 62,12 milyar pada tahun 2000. Dan pada kuartal III tahun 2001 nilai ekspor ini telah mencapai US \$ 48,21 milyar (dengan perkiraan pada akhir tahun 2001 mencapai US \$ 65-70 milyar).
2. Demikian pula nilai import bergerak dari US \$ 24,00 milyar pada tahun 1999 menjadi US \$ 33,52 milyar pada tahun 2000, yang pada kuartal III tahun 2001 telah mencapai US \$ 26,76 milyar (dengan perkiraan pada akhir tahun 2001 mencapai US \$ 35-40 milyar).
3. Neraca pembayaran Indonesia yang mulai surplus pada tahun 1999 walaupun pada tingkat yang rendah yaitu hanya US \$ 344 juta, yang selanjutnya pada tahun 2000 meningkat menjadi US \$ 1,23 milyar.
4. Tingkat inflasi telah mencapai kondisi yang normal pada tahun 2000 (9,4%) dan pada tahun 2001 masih terkendali (12,55%).
5. Suku bunga yang berlaku bagi kredit modal kerja berada pada tingkat yang moderat yaitu 20,7% pada tahun 1999, menjadi 17,7% pada tahun 2000 dan 19,19% pada tahun 2001. Demikian juga suku

bunga kredit investasi berada pada tingkat yang normal yaitu 17,8% pada tahun 1999 menjadi 16,9% pada tahun 2000 dan 17,9% pada tahun 2001.

6. Cadangan devisa nasional mulai membesar kembali setelah terpuruk pada tahun 1998 (hanya US \$ 14,56 milyar) walaupun belum mencapai kembali posisi tahun 1997 (US \$ 21,4 milyar). Pada tahun 2000 cadangan devisa nasional baru mencapai US \$ 17,79 milyar dan tahun 2001 meningkat menjadi US \$ 18,31 milyar. Peningkatan cadangan devisa nasional ini terjadi setelah badai penundaan bantuan pinjaman IMF sebesar US \$ 5 milyar teratasi pada tahun 2000 bersamaan dengan kesepakatan yang dicapai di Paris Club tentang penjadwalan kembali pembayaran utang sebesar US \$ 2,1 milyar.
7. Trend penguatan nilai tukar rupiah yang terjadi terhadap dollar Amerika selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2001. Pada tahun 1998 kurs rupiah itu pernah mencapai US \$ 1 = Rp. 17.000,00 (Juni 1998) dan menguat menjadi US \$ 1 = Rp. 7.500,00 (Nopember 1998) sehingga rata-rata selama tahun 1998 kurs ini mencapai US \$ 1 = Rp. 14.900,00. Kemudian pada tahun 1999 kurs rata-rata itu menguat menjadi US \$ 1 = Rp. 9.400,00 dan tahun 2000 menjadi US \$ 1 = Rp. 8.400,00. kemudian pada tahun 2001 sedikit melemah menjadi US \$ = Rp. 10.200,00 tetapi saat ini berada pada kisaran US \$ 1 = sekitar Rp. 8.500,00 - Rp. 9.000,00
8. Arus penanaman modal, baik dalam negeri maupun asing, meningkat kembali setelah terpuruk pada tahun 1998 walaupun belum mencapai posisi tahun 1997 (sebelum krisis). Pada tahun 1998 nilai investasi PMDN hanya Rp. 60,75 triliun (50,67% dari posisi 1997) dan PMA hanya US \$ 13,56 milyar (40,08% dari posisi 1997), yang kemudian masing-masing meningkat menjadi:
  - Rp. 92,33 triliun pada tahun 2000 dan sekitar Rp. 101,56 triliun pada tahun 2001 (77,03% dari posisi 1997)



- US \$ 15,41 milyar pada tahun 2000 dan sekitar US \$ 16,12 milyar pada tahun 2001 (47,65% dari posisi 1997).

Peningkatan arus penanaman modal ini, khususnya PMDN, terjadi karena mulai adanya kepercayaan para konglomerat yang telah melarikan modalnya ke luar negeri atas pemerintahan Gus Dur-Megawati sebelum Gus Dur di impeach. Ternyata impeachment Gus Dur melalui sidang Istimewa MPR tahun 2001 yang menimbulkan pergantian Pimpinan Nasional menjadi duet Megawati-Hamzah Haz secara berangsur-angsur menumbuhkan stabilitas politik di dalam negeri.

9. Pertumbuhan sektor riil (industri manufaktur, perdagangan, dsb) telah menunjukkan pertumbuhan positif sejak tahun 1999 hingga tahun 2001 pada tingkat yang cukup pesat. Industri manufaktur meningkat dari 3,81% pada tahun 1999 menjadi 6,20% pada tahun 2000 dan pada kuartal III tahun 2001 telah mencapai 4,58%. Sedang perdagangan mengalami laju pertumbuhan dari 0,11% pada tahun 1999 menjadi 5,69% pada tahun 2000 dan pada kuartal III tahun 2001 mencapai 6,33%.
10. Jumlah uang beredar, khususnya uang M1 (kartal dan giral), meningkat terus sehingga pada tahun:  
1999 menjadi Rp. 124,63 triliun  
2000 menjadi Rp. 162,19 triliun  
2001 (kuartal III) menjadi Rp. 169,96 triliun  
yang bila dibanding posisi 1997 (sebelum krisis) masing-masing mencapai:  
158,96% pada tahun 1999  
207,03% pada tahun 2000, dan  
216,95% pada kuartal III tahun 2001.

Peningkatan peredaran uang ini beriringan dengan peningkatan kegiatan ekonomi dan meningkatnya defisit anggaran negara.

Dari tanda-tanda perkembangan ekonomi tersebut dapat ditangkap suatu petunjuk pemulihan ekonomi Indonesia dari



keterpurukannya. Awal pemulihan itu telah berlangsung mulai awal tahun 2000 dan terus berlanjut sampai sekarang secara bertahap walaupun dalam kondisi merambat perlahan.

Para Undangan dan hadirin yang mulia,

Pemulihan ekonomi Indonesia yang berlangsung mulai awal tahun 2000 itu masih menyisihkan persoalan krisis yang masih berlangsung sampai saat ini dan membebani kinerja ekonomi Indonesia. Persoalan-persoalan itu menyangkut: kondisi perbankan yang belum sepenuhnya sehat, kepercayaan luar negeri atas stabilitas politik yang belum sepenuhnya kondusif, kerusuhan massa yang masih melanda beberapa daerah termasuk upaya melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia serta unjuk rasa euphoria massa khususnya massa buruh yang dapat mengganggu kegiatan produksi.

Namun kesemua itu tidak menghentikan gerak roda pemulihan ekonomi Indonesia yang telah berlangsung saat ini dan akan bergerak terus pada masa depan. Tampaknya roda pemulihan ekonomi ini ikut dipacu oleh semakin menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dan semakin meningkatnya pengeluaran konsumsi masyarakat secara luas. Ini jelas tampak dari semakin maraknya aktivitas transaksi ekonomi masyarakat baik yang terjadi dipasar-pasar tradisional maupun pasar modern (plaza, mal, supermarket, dsb).

Demikian pula maraknya perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam bentuk semakin banyaknya pedagang kaki lima (PKL) disepanjang jalan ekonomis atau tempat-tempat strategis, meng-identifikasikan perkembangan pemulihan ekonomi menuju taraf yang normal. Sayangnya UKM/PKL yang merupakan cerminan berlangsungnya ekonomi kerakyatan dan mampu bertahan selama krisis ekonomi bahkan menampung peralihan kegiatan dari karyawan yang terkena PHK, kurang mendapat

perhatian dan kebijakan pembinaan dan pengembangannya secara memadai oleh pemerintah khususnya. Pemerintah Daerah. Bilamana pemerintah dalam menangani usaha kecil dan menengah lebih bersifat ramah terhadap pasar (market friendly) dan pemerintah berperan sebagai fasilitator atau mediator maka harapan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih besar dapat diletakkan pula ditangan pengusaha kecil dan menengah itu.

Sementara itu dari berbagai pendapat dan pandangan yang berkembang di masyarakat diperoleh kesan bahwa pemulihan ekonomi yang berlangsung pada saat ini dan perkembangannya pada masa depan akan mencapai hasil yang optimal bilamana:

1. Pemerintah memperoleh kepercayaan yang luas dari berbagai kalangan di dalam negeri maupun luar negeri khususnya dari kalangan dunia usaha. Untuk ini perlu membangun struktur pemerintahan atas dasar good governance dan menciptakan stabilitas politik yang mantap, termasuk kemampuan mengatasi dan meredam benih-benih kekerasan, kerusuhan dan kekacauan yang dapat menimbulkan ledakan sosial.
2. Inflasi dapat dikendalikan secara sistematis pada tingkat yang rendah (satu digit) melalui mekanisme kebijakan fiskal dan moneter yang konsisten.
3. Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dan mata uang asing yang kuat lainnya dapat dicapai melalui pengembangan instrumen kebijakan pengendalian lalu-lintas devisa secara konsekuen dan konsisten.
4. Penyehatan dunia perbankan dapat dipercepat melalui mekanisme restrukturisasi perbankan dan dunia usaha dengan memprioritaskan pada program rekapitalisasi yang disertai dengan pengendalian bank secara sehat atas dasar prudential policy (kebijaksanaan atas dasar kehati-hatian).
5. Pengembangan sektor industri dilaksanakan secara terpadu antara industri hulu dan hilir sehingga tercapai keseimbangan yang mantap dalam perkembangannya di dalam bingkai orientasi

outward looking dan inward looking yang serasi. Pengembangan sektor industri ini juga akan memperbesar penyerapan tenaga kerja dan mengurangi angka penganggaran.

6. Paradigma kebijakan ekonomi dirubah dari yang semula berbasis konglomerasi yang tidak sehat menjadi keseimbangan keterkaitan antara konglomerasi dan ekonomi kerakyatan yang serasi dan sehat. Untuk itu perlu re-orientasi program pembangunan sehingga lebih memberdayakan ekonomi kerakyatan, lebih mementingkan pemerataan daripada pertumbuhan dan memperbesar efek tetesan ke bawah dari hasil-hasil pembangunan.
7. Ketergantungan pada bantuan dan pinjaman luar negeri dapat dikurangi secara bertahap menuju pada kemandirian dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi tanpa meninggalkan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan.
8. Perombakan dan penyempurnaan sistem birokrasi secara terstruktur sehingga dapat mengurangi secara maksimal kemungkinan terjadinya high cost economy (ekonomi biaya tinggi).
9. Penegakan hukum dapat dilakukan secara konsisten dan konsekuen dalam rangka pemberantasan berbagai bentuk penyimpangan dan penyelewengan khususnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme secara menyeluruh.
10. Kesejahteraan sosial rakyat dapat ditingkatkan secara memadai guna mendorong peningkatan fungsi konsumsi masyarakat secara bertahap serta menegakkan keadilan sosial guna memperkecil kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial.

Kesemua program pemulihan krisis ekonomi itu memerlukan komitmen nasional secara konsekuen, arif dan bijaksana dalam kerangka mempercepat proses pemulihan ekonomi Indonesia dari keterpurukannya guna melaju pada perkembangan masa depan yang maju, modern dan berkesinambungan menuju pada bangunan masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan bangsa Indonesia.

Para Undangan dan hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan ini perkenan saya merangkai pidato ilmiah dalam rangka peresmian penerimaan diri saya sebagai guru besar dalam ilmu ekonomi pada Universitas Airlangga dengan penyampaian ucapan dan rasa terima kasih saya yang tak terhingga dan mendalam kepada: Prof. Dr. Moelyadi Banoewidjojo, Ir, almarhum, selaku promotor saya yang pertama dan Prof. H. Miendrowo Prawirodjoemeno, SE, almarhum selaku promotor kedua, yang pada masa akhir hayat kedua beliau yang amat saya hormati itu telah mencurahkan tenaga dan pikiran secara tulus dan ikhlas dalam membimbing diri saya serta mentransfer ilmu yang berguna bagi diri saya sehingga dapat mencapai gelar Doktor dalam ilmu ekonomi. Demikian pula saya sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada Prof. Dr. H. Goeswono Soepardi, Ir, MSc, selaku promotor saya yang ketiga beserta Ibu, yang berkenan hadir pada kesempatan ini menyaksikan langsung peresmian penerimaan guru besar dari seorang yang pernah dibimbingnya. Beliau dengan penuh kesabaran dan tulus ikhlas telah mentransfer ilmu, membimbing dan mempertaruhkan reputasi akademiknya dalam mengantarkan diri saya meraih gelar Doktor dalam ilmu ekonomi pada tanggal 12 April 2000. Untuk itu semua sekali lagi saya sampaikan terima kasih saya yang amat dalam.

Keberhasilan yang saya capai dalam bidang akademik ini tidak dapat dilepaskan dari peranan dan sumbangsih para Bapak dan Ibu guru saya semasa belajar di Sekolah Rakyat (SR) yang sekarang menjadi Sekolah Dasar (SD) Seruni II Surabaya, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri II Surabaya serta Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri III Bagian B Surabaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Untuk semua Bapak dan Ibu Guruku itu saya merasa berhutang budi dan patut saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Demikian pula kepada para Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga yang pernah mendidik dan mengajar diri saya dalam bidang ilmu ekonomi sehingga saya dapat meraih gelar Doctorandus Economicus (Drs.Ec.) atau sekarang menjadi Sarjana Ekonomi (SE) pada tahun 1974, saya juga berhutang budi pada Bapak dan Ibu Dosen itu. Oleh karenanya perkenan saya pada kesempatan ini menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga.

Dalam perjalanan hidup saya pernah saya lalui dengan melaksanakan tugas belajar di Stratchclyde University, Glasgow, Inggris dan mendapat tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang marketing (pemasaran) dari para Staf Pengajar Universitas tersebut sehingga mendapat sertifikat Specialist of Marketing pada tahun 1978. Kepada para Staf Pengajar itu khususnya Prof. Simon Coke, Prof. Norman Hunt dan Prof. Livingstone saya berhutang budi dan perkenan pula pada kesempatan ini menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Pada kesempatan ini juga tak lupa saya sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang amat dalam kepada yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Dr. H. A. Malik Fadjar, yang telah berkenan dan memberi kepercayaan pada diri saya untuk diangkat menjadi guru besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.

Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Prof. Dr. Satrio Sumantri Brojonegoro, Ir, saya sampaikan pula rasa hormat dan terima kasih yang mendalam atas kepercayaan pada diri saya untuk diangkat menjadi guru besar pada Universitas Airlangga.

Rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga dan amat mendalam saya sampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr.Med. H. Puruhito, dr., Sp.B, para Pembantu Rektor, Dekan Fakultas Ekonomi serta para anggota Senat Fakultas Ekonomi dan Senat Universitas Airlangga., yang telah dengan tulus

ikhlas bersedia mengusulkan diri saya untuk menjadi guru besar dan menerima saya menjadi bagian dari Senat Universitas Airlangga.

Kepada yang terhormat mantan Rektor Universitas Airlangga, Prof. H. Soedarto, dr, DTM&H, Ph.D, dan Prof. H. Bambang Rahino Setokosoemo, dr. serta Prof. H. Soedarso Djojonegoro, dr, saya sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dorongan, kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan pada diri saya dalam rangka mengikuti program doktor di Universitas Airlangga.

Demikian pula rasa hormat dan terima kasih yang sama saya sampaikan kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Prof. Dr.Med. H. Muh. Amin, dr., Sp.P, dan mantan Direktur Program Pascasarjana Prof. Dr. H. Soedijono, dr., dan para mantan Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga, Prof. R. Hartono, drg, almarhum, dan Prof. Dr. Sutarjadi, Apt, serta para Asisten Direktur Program dan para Pembantu Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga, yang telah memberikan dorongan, semangat dan fasilitas kepada diri saya selama saya mengikuti program pendidikan doktor di Universitas Airlangga.

Dalam proses pengusulan jabatan guru besar, saya merasa berhutang budi amat banyak pada rekan-rekan yang telah dengan tulus ikhlas memberikan dukungan, saran dan bantuan dalam upaya memperlancar dan mempercepat proses pengusulan itu. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

- Para anggota Dewan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
- Para Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, khususnya Pembantu Dekan I pada saat itu.
- Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.

- Staf Sub. Bagian Kepegawaian Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Kantor Pusat Universitas Airlangga beserta Staf jajarannya, khususnya staf Bagian kepegawaian dan Sekretaris mantan Pembantu Rektor II periode 1993-2001.
- Sekretaris Senat Universitas Airlangga, dan
- Salah seorang guru besar Staf Laboratorium Analis Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Airlangga (H.MM), yang dengan setia telah memberikan saran-saran dan bantuan dalam rangka persiapan pengusulan jabatan guru besar saya.

Selanjutnya kepada kedua orang tua saya, yaitu Ayah saya H. Oemar Banadji (Almarhum) dan Ibu saya Hj. Fatonah (Almarhumah), saya sampaikan rasa hormat dan penghargaan yang tak terhingga serta terima kasih dan sembah sujud yang amat dalam atas segala kasih sayang yang telah diberikan selama mengasuh, membesarkan, menyekolahkan, mendidik dan membina diri saya menjadi insan yang berguna bagi masyarakat. Sekiranya kedua orang tua saya itu masih dapat menyaksikan upacara peresmian penerimaan jabatan guru besar saya saat ini, dapat saya pastikan kedua orang tua saya itu berbinar penuh kebanggaan menyaksikan keberhasilan anaknya dalam meraih cita-citanya. Sayang kedua beliau secara fisik tidak dapat hadir menyaksikan upacara yang khikmat ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kedua orang tua saya itu dan menempatkan disisiNya yang mulia.

Demikian pula kiranya saya sampaikan rasa hormat, penghargaan, terima kasih dan sembah sujud yang sama kepada Bapak dan Ibu mertua saya Almarhum dan Almarhumah yang pada saat ini juga tidak dapat menyaksikan keberhasilan anak menantunya dalam mencapai cita-citanya.

Kiranya tidak berlebihan, bilamana pada kesempatan ini secara khusus menyampaikan rasa terima kasih serta kasih sayang



saya kepada keluarga yang amat saya cintai, istri saya Hj. Tjumik Soejatmi dan ketiga anak kami: Donnie Arifianto, Dra. Ec. Virly Mavitasari dan Rizky Parisha, yang dengan penuh kesabaran dan pengertian dalam memberikan semangat dan dorongan dalam rangka mencapai keberhasilan saya ini.

Demikian pula saya sampaikan rasa kasih sayang kepada Menantu kami, Kapten (P) dr. Hisnendarsyah, SE, MS, dan kedua cucu kami Mochammad Givari Mahindisyah dan Azeldin Aliyah Sahirah, yang juga ikut mengiringi diri saya dalam mencapai keberhasilan ini.

Kepada adik-adik saya dan adik-adik ipar yang telah membantu dan memberi semangat dalam rangka mencapai keberhasilan saya ini saya sampaikan pula terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kepada seluruh anggota Panitia Pengukuhan Guru Besar ini serta mahasiswa Unit Paduan Suara saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya karena berkat peran mereka itu penyelenggaraan upacara ini berlangsung dengan khidmat.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati mohon maaf bilamana terdapat hal-hal yang menyebabkan Bapak dan Ibu hadirin kurang berkenan dihati dan dengan segala hormat saya sampaikan terima kasih atas kesabaran Bapak dan Ibu hadirin mengikuti upacara yang amat melelahkan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dengan anugerah Taufiq dan HidayahNya serta perlindunganNya kepada kita semua.

**Amin Ya Robbal Alamin.**

**Wabillahittaufiq walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

## Daftar Kepustakaan

- A.Prasetyantoko**, 2001. *Ekonomi Baru*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Arief, Sritua**, 2001. *IMF/Bank Dunia & Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Badan Pusat Statistik**, 2002. *Indikator Ekonomi*, Jakarta: Bagian Penggandaan BPS, 2001, *Pendapatan Nasional Indonesia 1997-2000*, Jakarta: Bagian Penggandaan BPS.
- Effendie**, 2002. *Lingkungan Global Strategis*, Makalah, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Haz, Hamzah**, 2001. *Mengkaji Ulang Politik Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Pustaka Ciganjur.
- Ismawan, Indra**, 1999. *Perekonomian Indonesia dari Masa Lalu ke Masa Depan*, dalam *Usahawan* No. 01 TH. XXVIII, Jakarta: Lembaga Management FE-UI.
- Latief, Dochak**, 2001. *Pembangunan Ekonomi, dan Kebijakan Ekonomi Global*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Mahyudin, Moch. Iksan**, 1989. *Pelarian Modal dari Indonesia: Estimasi dan Masalahnya*, dalam *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. XXXVIII No. 1, Jakarta: LPEM-FE UI.
- Nasution, Anwar**, 2002. *The Indonesian Economic Recovery from The Crisis in 1997-1998*, dalam *Journal of Asian Economics*, Article in Press, North-Holland: Elsevier Science, inc.
- Sadli, M**, 2001. *Landscape Ekonomi & Politik dalam Krisis dan Transisi*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sri Hartati**, 2001. *Analisis Kebangkrutan Bank*, dalam *Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia*, Yogyakarta: FE-UGM.